



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Reses IV Tahun Sidang 2024-2025 (25 Juli – 14 Agustus 2025)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
PLT. KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
KOMISI II	2
A. FUNGSI LEGISLASI	2
B. FUNGSI ANGGARAN	2
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
KOMISI III	3
A. FUNGSI LEGISLASI	3
B. FUNGSI ANGGARAN	3
C. FUNGSI PENGAWASAN	3
KOMISI IV	6
A. FUNGSI LEGISLASI	6
B. FUNGSI ANGGARAN	6
C. FUNGSI PENGAWASAN	6

KOMISI V	9
A. FUNGSI LEGISLASI	9
B. FUNGSI ANGGARAN	9
C. FUNGSI PENGAWASAN	9
KOMISI VI	11
A. FUNGSI LEGISLASI	11
B. FUNGSI ANGGARAN	11
C. FUNGSI PENGAWASAN	11
KOMISI VII	13
A. FUNGSI LEGISLASI	13
B. FUNGSI ANGGARAN	13
C. FUNGSI PENGAWASAN	13
KOMISI VIII	16
A. FUNGSI LEGISLASI	16
B. FUNGSI ANGGARAN	20
C. FUNGSI PENGAWASAN	20
KOMISI IX	21
A. FUNGSI LEGISLASI	21

B. FUNGSI ANGGARAN	21
C. FUNGSI PENGAWASAN	21
KOMISI X	24
A. FUNGSI LEGISLASI	24
B. FUNGSI ANGGARAN	24
C. FUNGSI PENGAWASAN	24
KOMISI XI	33
A. FUNGSI LEGISLASI	33
B. FUNGSI ANGGARAN	33
C. FUNGSI PENGAWASAN	33
KOMISI XII	38
A. FUNGSI LEGISLASI	38
B. FUNGSI ANGGARAN	38
C. FUNGSI PENGAWASAN	38
KOMISI XIII	39
A. FUNGSI LEGISLASI	39
B. FUNGSI ANGGARAN	39
C. FUNGSI PENGAWASAN	39

BADAN LEGISLASI	48
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	49
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	57

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kemlu	Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI dilaksanakan pada tanggal 25 – 31 Juli 2025.	Komisi I DPR RI melaksanakan kunjungan kerja Pengawasan Luar negeri ke : 1. Negara New Zeland; 2. Negara Australia; dan 3. Negara Papua Nugini	
2.	Kemhan/ TNI	Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI tanggal 10 – 13 Agustus 2025.	Melaksanakan Kunjungan Kerja Reses MP IV TS 2024/2025 ke : 1. Provinsi Bangka Belitung; 2. Provinsi Jambi; dan 3. Provinsi Sumatera Barat	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Pemerintah Daerah 2. Kanwil BPN 3. Kantor Pertanahan	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024 – 2025 ke Provinsi Aceh, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi NTT, tanggal 25 – 29 Juli 2025.		

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi III DPR RI ke Negara Korea Selatan tanggal 8 s.d. 14 Juli 2025.		--
2.		Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi III DPR RI ke Negara Turki tanggal 8 s.d. 14 Juli 2025.		

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah	Kunres dalam rangka fungsi Pengawasan dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 29 Juli 2025 dalam rangka fungsi pengawasan.	Kunjungan kerja ini menghasilkan masukan sebagai berikut: 1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan terkait pencapaian maupun kendala yang dihadapi dan terus mendukung peningkatan kualitas kinerja Polda, Kejaksaan Tinggi, dan BNNP Sulawesi Tengah. 2. Komisi III DPR RI mendukung pemenuhan kebutuhan anggaran Polda, Kejaksaan Tinggi, dan BNNP Sulawesi	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Tengah maupun dukungan sarana dan prasarana lainnya untuk pemenuhan sumber daya organisasi.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta para Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengoptimalkan anggaran yang ada dalam mencapai target kinerja, serta akan menindaklanjuti kendala dan usulan kebutuhan yang telah disampaikan kepada para Mitra Kerja Komisi III DPR RI di pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>4. Komisi III DPR RI meminta seluruh Mitra Kerja di Provinsi Sulawesi Tengah untuk tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas kerja, serta peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik pada masing-masing tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat.</p> <p>5. Komisi III DPR RI meminta agar kerja sama dalam bentuk koordinasi, kolaborasi, dan berbagai kegiatan bersama dapat terus ditingkatkan baik di dalam maupun luar instansi, baik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu maupun instansi lainnya untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja yang terarah dan profesional.</p>	
2.	Kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat	Kunres dalam rangka fungsi Pengawasan tanggal 25 s.d 29 Juli 2025.	<p>Kunjungan kerja ini menghasilkan masukan sebagai berikut:</p> <p>1. Komisi III DPR RI telah menerima penjelasan terkait capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kinerja Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta mendukung pengajuan usulan kebutuhan anggaran yang telah disampaikan.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur terutama dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan orang (<i>human smuggling</i>), serta mengharapkan agar Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk fokus penuh dalam penanganan kasus tersebut.</p> <p>3. Komisi III DPR RI meminta kepada Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan laporan lengkap berisi data, proses, dan tindak lanjut terkait kasus perdagangan orang (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO) serta kasus perlindungan perempuan dan anak di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2024–2025.</p> <p>4. Komisi III DPR RI meminta kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan kerja sama dengan <i>stakeholder</i> lain dalam upaya penguatan preventif penyebaran narkotika di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>5. Komisi III DPR RI mengusulkan kepada para Mitra Kerja Komisi III DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membentuk desa yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	<ol style="list-style-type: none"> Gubernur Bali; Walikota Denpasar; Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementan; Dirjen Perhutanan Sosial Kemenhut; Dirjen Pengawasan SD Kelautan dan Perikanan, KKP Deputi Badan Pangan Nasional; Deputi Badan Karantina Indonesia; Direksi Perum BULOG; Direksi PT Pupuk Indonesia; Direksi ID FOOD; dan 1 Satgas Pangan Provinsi Bali. 	Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 1-5 Agustus 2025.	Pertemuan dan Diskusi di Kantor Gubernur membahas mengenai Sektor Pangan. Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta Perkarantinaan.	
2	<ol style="list-style-type: none"> Gubernur Sulawesi Selatan; Walikota Makassar; 	Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Sidang IV	1. Meninjau UPT Badan Pengendalian Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	3. Kepala Badan Pangan Nasional; 4. Kepala Badan Karantina Indonesia; 5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan; 6. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; 7. Direktur Utama Perum BULOG; 8. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero); 9. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara/Holding Pangan ID FOOD; 10. Satgas Pangan Provinsi Sulawesi Selatan; 11. Kepala Badan Pengendalian Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 12. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan; 13. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros; dan 14. Pelaku Usaha Pengolahan Ikan.	Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 10-14 Agustus 2025.	Perikanan di UPT Badan Pengendalian Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Makassar (BPPMHKP Makassar) 2. Meninjau Gudang Bulog Panaikang ketersediaan stok beras dalam rangka pemenuhan kebutuhan beras dan stabilitas harga beras di Provinsi Sulawesi Selatan 3. Panen Padi dan Diskusi (Tudang Sipulung) di Lokasi Panen Padi Kecamatan Turikale, Kelurahan Raya Kabupaten Maros.	
3	1. Gubernur Kalimantan Timur; 2. Walikota Bontang; 3. Badan Pangan Nasional; 4. Badan Karantina Indonesia; 5. Dirjen PSP Kementerian Pertanian; 6. Dirjen KSDAE, Kementerian Kehutanan; 7. Dirjen Perikanan Tangkap, Kementerian KP; 8. Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian; 9. Direksi PT Pupuk Indonesia; 10. Direksi PT Pupuk Kaltim;	Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 ke Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 10-14 Agustus 2025.	1. Penanaman Mangrove, Peninjauan dan Diskusi mengenai Pengelolaan <i>Bontang Mangrove Park</i> . 2. Peninjauan serta Diskusi di lokasi Pabrik PT Pupuk Kalimantan Timur Bontang 3. Peninjauan Fasilitas Pelabuhan Perikanan PPI Tanjung Limau Bontang dan Berdiskusi dengan Nelayan mengenai Permasalahan Nelayan	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA/PIHAK	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	11. ID <i>FOOD</i> /PT Perikanan Indonesia; 12. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. 13. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur. 14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang; 15. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda; 16. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur; 17. Penyuluh, Distributor, Pengecer, dan Gapoktan Provinsi Kalimantan Timur; serta 18. Masyarakat Nelayan			

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kementerian PU: <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Bina Marga - Ditjen SDA - Ditjen Cipta Karya - Ditjen Prasarana Strategis 2. Kementerian Perhubungan : <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Perhubungan Udara - Ditjen Perhubungan Darat - Ditjen Perhubungan Laut - Ditjen Perkeretaapian - PT. API - PT. Pelindo - PT. K.A.I - PT. Peln - PT. Airnav Indonesia - BUJT yang beroperasi di Wilayah Jawa Tengah 	Kunjungan Kerja Reses dilaksanakan pada tanggal 25 s.d. 29 Juli 2025.	1. Dalam rangka peninjauan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta Seksi 6 ke Provinsi Jawa Tengah; 2. Dalam rangka peninjauan Rusun ASN dan Bandara di Ibukota Nusantara di Kalimantan Timur.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman 4. Kementerian Desa dan PDT 5. Kementerian Transmigrasi 6. BMKG 7. Basarnas			
2.	Kementerian Perhubungan	Kunjungan Kerja Luar Negeri dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 14 Agustus 2025.	Dalam rangka mempererat hubungan Diplomasi khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan di Bidang Infrastruktur dan Transportasi ke negara Australia, Jepang dan Turki.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kota Sorong, Papua Barat Daya. 1. Eselon I Kementerian Perdagangan 2. BRI 3. Telkom 4. Telkomsel 5. PLN Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya 1. Eselon I Kementerian BUMN 2. Eselon I Kementerian Koperasi 3. Pelindo 4. Pelni 5. Mind ID 6. Antam	Kunker Reses Komisi VI DPR RI dilaksanakan pada hari Jumat-Selasa, 25-29 Juli 2025 ke: 1. Kota Sorong, Papua Barat Daya. 2. Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.	1. Pengembangan Sektor Ekonomi Kerakyatan Beserta Jaringan Telekomunikasi dan Listrik di Wilayah Indonesia Timur. 2. Pembahasan Konektivitas Beserta Pengembangan Sektor Koperasi dan Pertambangan di Wilayah Indonesia Timur.	
2.	1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul. 2. Atase Perdagangan RI Korea Selatan 3. Indonesia Trade Promotion Center	Kunjungan Kerja dalam rangka fungsi Pengawasan dilaksanakan pada hari Rabu –	Kunjungan Kerja Luar Negeri ke Korea Selatan pada 30 Juli hingga 5 Agustus 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan representasi di bidang perdagangan serta Badan Usaha Milik Negara	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	(ITPC) 4. Kementerian BUMN 5. PT Bank BNI (Persero) Tbk. 6. PT PGN 7. PT Bank Syariah Indonesia 8. PT Danareksa 9. PT Bank Mandiri 10. PT Garuda Indonesia	Selasa, 30 Juli – 5 Agustus 2025.	(BUMN). Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan langsung mengenai diplomasi ekonomi, promosi ekspor, dan peran BUMN di luar negeri.	
3.	1. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia 2. Atase Perdagangan Republik Indonesia di Australia. 3. PT BNI (Persero) Tbk., Canberra Branch. 4. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 5. PT Pupuk Indonesia (Persero) 6. PT Biofarma (Persero) 7. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) 8. Perum Bulog 9. Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) 10. PT. BRI (Persero) Tbk	Kunjungan Kerja dalam rangka fungsi Pengawasan dilaksanakan pada hari Jumat - Kamis, 8 Agustus – 14 Agustus 2025.	Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Australia, serta untuk mendalami peran ekspansi bisnis BUMN di pasar global.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	Kunjungan kerja luar negeri Panja Komisi VII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (RUU tentang Kepariwisata) ke Negara Ceko dilaksanakan pada hari Jumat 8 Agustus s.d. Kamis 14 Agustus 2025.	Untuk menganalisis kerangka regulasi dan kebijakan pariwisata di Negara Ceko, termasuk vokasi, pendidikan, standar kualitas guna mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat diadaptasi atau dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RUU tentang Kepariwisata.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Pariwisata; 3. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; 4. Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);	Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Minggu, 25 s.d. 29 Agustus 2025, ke : 1. Provinsi Riau 2. Provinsi Jawa Tengah 3. Provinsi Sumatera Utara	1. Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Riau menjadi bagian dari evaluasi potensi strategis Kabupaten Siak sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) . “Inisiatif ini adalah langkah proaktif untuk mengidentifikasi aset pariwisata dan ekonomi daerah yang belum teroptimalkan. pengembangan Kabupaten Siak harus berbasis pada kekuatan lokal, baik	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	5. Badan Standardisasi Nasional (BSN); 6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI); 7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI); dan 8. Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara.		<p>dari segi budaya maupun pelaku usaha. “Siak memiliki modal sejarah dan budaya Melayu yang sangat kuat. Namun, potensi ini harus ditopang oleh penguatan UMKM, infrastruktur wisata, serta kreativitas pelaku industri lokal agar bisa bersaing dengan destinasi besar seperti Bali atau Labuan Bajo”.</p> <p>2. Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah menyoroti pentingnya transparansi anggaran publik, khususnya terkait alokasi dana untuk festival budaya yang kerap menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Selain itu, pembenahan birokrasi dianggap krusial agar dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi tumbuhnya wirausaha-wirausaha lokal di daerah. Dalam konteks industri batik, Komisi VII menekankan perlunya langkah nyata untuk memperkuat industri tekstil dan sandang, serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor seperti canting, kain dasar, dan lilin batik. Dorongan juga diberikan kepada berbagai pihak, termasuk lembaga riset dan perguruan tinggi, untuk mengeksplorasi potensi bahan baku lokal seperti serat kapas, dan serat rami, guna mendukung pengembangan fesyen berkelanjutan. Dalam kunjungan ke Manimonki Studio Animasi, Komisi VII juga mencermati perkembangan industri animasi lokal. Studio ini dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan konten dan kekayaan intelektual (<i>intellectual property</i>). Komisi mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan</p>	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>dukungan nyata dan tidak hanya bergantung pada sektor swasta. Dukungan tersebut penting dalam hal promosi, pembiayaan, hingga distribusi karya animasi agar bisa bersaing di pasar internasional. Perlindungan hak kekayaan intelektual juga menjadi perhatian serius, mengingat potensi besar dari karya kreatif lokal yang belum mendapatkan penguatan secara regulatif dan struktural.</p> <p>3. Kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, berfokus pada pemberdayaan UMKM. Komisi VII meninjau langsung pelaksanaan Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Perkampungan Pemuda HKBP Jetun Silangit, Desa Pohan Tonga, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Festival ini menghadirkan berbagai layanan terpadu bagi lebih dari seribu pelaku UMKM. Selanjutnya, dilakukan pertemuan strategis dengan Menteri Koperasi dan UKM RI, Badan Standardisasi Nasional, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Tapanuli Utara, serta perwakilan dari TVRI, RRI, dan LKBN Antara guna membahas penguatan kebijakan pemberdayaan usaha rakyat. Pertemuan ini menyoroti berbagai tantangan dan potensi pengembangan kawasan Danau Toba sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGGp) serta strategi investasi jangka panjang berbasis kolaborasi antar sektor.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1	RUU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	--	Sudah Selesai Harmonisasi.	
2.	RUU mengenai RUU Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Haji	Kunjungan Ke Luar Negeri ke Inggris dilaksanakan pada tanggal 8-14 Agustus 2025.	<p>Secara umum, Kunjungan Kerja Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ke Negara Inggris yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 – 14 Agustus 2025 telah memberikan gambaran yang jelas tentang beberapa hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Keuangan Haji di Inggris mengalami tantangan yang tidak mudah, khususnya jika disinergikan dengan ekosistem investasi maupun perbankan syariah. Mayoritas jemaah haji di Inggris masih mengandalkan Bank Konvensional serta pola investasi yang belum mengutamakan kesesuaian dengan prinsip syariah, sehingga proses pengelolaan keuangan haji yang dilaksanakan di Inggris masih mengalami banyak persoalan. 2. Ketiadaan peran negara termasuk regulasi dalam mengatur penyelenggaraan maupun pengelolaan keuangan haji di Negara Inggris juga menjadi salah satu faktor tantangan pengelolaan keuangan haji di Inggris yang ditemukan dalam Kunjungan Kerja 	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>ini. Perlindungan jemaah terkait dalam melaksanakan ibadah haji hanya mengacu pada hak-hak dasar sipil khususnya hak untuk beribadah dan memilih agama yang diyakini serta peraturan tentang perlindungan konsumen, manakala para calon jemaah haji Inggris mengalami penipuan atau layanan yang tidak sesuai dari travel haji yang telah mereka pilih.</p> <p>3. Visi 2030 Arab Saudi yang mendorong adanya digitalisasi dan perluasan akses terhadap Haji dan Umrah Mandiri merupakan narasi utama yang sangat penting untuk dipersiapkan oleh Indonesia. Konsep Haji Mandiri yang selama ini telah berjalan di Inggris ternyata merupakan konsep yang akan diberlakukan oleh Arab Saudi dalam Visi 2030-nya. Bagi Negara Inggris, hal ini tentu sangat menguntungkan sehingga mereka tidak perlu melakukan banyak penyesuaian, kecuali proses digitalisasi. Namun bagi Indonesia, hal ini harus dipersiapkan mengingat Haji Mandiri merupakan mekanisme yang tidak pernah diberlakukan, sehingga adanya Visi 2030 tersebut perlu dipersiapkan dengan cepat oleh Indonesia, khususnya terkait perlindungan jemaah serta adaptasi terhadap digitalisasi seluruh proses administrasi pada saat pelaksanaan ibadah haji.</p> <p>4. Dalam konteks pengelolaan keuangan haji yang selama ini berjalan di Indonesia, adanya konsep Haji Mandiri dalam Visi 2030 Arab Saudi juga perlu diantisipasi, khususnya terkait jumlah dana kelolaan yang saat ini dilaksanakan oleh BPKH, yang kemungkinan besar akan berkurang. Saat ini, BPKH mengelola sekitar Rp170 Triliun yang didapat dari 5,3 juta pendaftar haji yang telah</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>menyerahkan setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp25 Juta per jemaah. Ketika adanya konsep Haji Mandiri dalam Visi 2030 Arab Saudi, maka bukan tidak mungkin, dari 5,3 juta pendaftar haji akan memilih jalur Haji Mandiri dan menarik setoran awal mereka, termasuk Nilai Manfaat yang telah dihasilkan selama masa tunggu yang telah mereka lalui. Hal ini akan berdampak pada berkurangnya dana kelolaan, termasuk keberlanjutan dana haji dan keadilan itu sendiri, mengingat jemaah yang telah lebih dulu berangkat telah menerima Nilai Manfaat dari hasil dana yang di kelola oleh BPKH, sedangkan jemaah yang belum berangkat dan jika terjadi banyaknya jemaah lain yang menarik dana setoran awal mereka, maka sisa jemaah yang belum berangkat tersebut kemungkinan akan mengalami hambatan, khususnya terkait distribusi Nilai Manfaat ketika mereka akan berangkat.</p> <p>A. Rekomendasi</p> <p>Adapun rekomendasi dari berbagai temuan dalam Kunjungan Kerja Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji ke Negara Inggris yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 – 14 Agustus 2025 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan keuangan haji yang selama ini berjalan di Indonesia telah cukup baik. Namun demikian, melalui Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No.34 Tahun 2014	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>tentang Pengelolaan Keuangan Haji, diharapkan BPKH dapat meningkatkan Nilai Manfaat yang dihasilkan dari dana kelolaan yang ada, termasuk distribusi Nilai Manfaat yang lebih proporsional, serta melakukan investasi langsung pada ekosistem ekonomi haji maupun umrah yang potensinya begitu besar.</p> <p>2. Penguatan Kerja Sama antara BPKH dengan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) maupun Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal ini perlu dilakukan agar ribuan PIHK dan PPIU tersebut dapat mengoptimalkan berbagai sarana dan prasarana serta berbagai produk yang merupakan wujud investasi langsung yang dilakukan oleh BPKH. Penguatan kerja sama tersebut dilakukan secara jangka panjang sehingga dapat saling memberikan keuntungan, serta memperkuat ekosistem ekonomi haji dan umrah.</p> <p>3. Adanya Visi 2030 yang utamanya adalah digitalisasi seluruh proses registrasi pelaksanaan ibadah haji perlu dipersiapkan dengan baik oleh Indonesia, melalui adanya <i>Single Gateway</i> data jemaah haji yang berangkat setiap tahunnya, yang terkoneksi dengan <i>Platform Nusuk</i> milik Arab Saudi, Data Keimigrasian Indonesia, serta Data Perlindungan WNI di Kementerian Luar Negeri Indonesia. Hal ini amat penting sebagai wujud nyata perlindungan Warga Negara Indonesia yang merupakan mandat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4. Diperlukan skema Setoran Angsuran dalam Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Hal ini dilakukan agar dana yang dikelola oleh BPKH tidak hanya bersumber dari setoran awal Bipih, tetapi juga dari Setoran Angsuran yang dapat dilakukan oleh para calon jemaah haji. Hal ini juga penting untuk dilakukan agar keberlanjutan dana haji tetap aman, serta adanya dana untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk dua tahun berjalan pun tetap tersedia ditengah adanya kemungkinan akan terjadinya penarikan dana setoran awal akibat skema Haji Mandiri yang akan diberlakukan oleh Arab Saudi.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

-

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR RI ke Negara Kroasia	<p>Kunjungan Kerja dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Kamis, 25 s.d. 31 Juli 2025.</p> <p>Kunjungan ini memiliki arti penting dan akan saling memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia – Kroasia dalam bingkai kemitraan baik di bidang kesehatan maupun bidang ketenagakerjaan. Adapun sasaran yang hendak dikaji dalam kunjungan ini adalah upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kroasia, khususnya terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di sektor kesehatan dan ketenagakerjaan khususnya upaya meningkatkan sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan kebijakan dan regulasi di sektor kesehatan khususnya mengenai pelayanan</p>	<p>Kunjungan Komisi IX menghasilkan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Diplomasi untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia - Kroasia dalam bingkai kemitraan baik di bidang kesehatan maupun bidang ketenagakerjaan.2. Melakukan pertemuan dan diskusi dengan Pemerintah Kroasia terkait agenda transformasi sistem kesehatan dan bagaimana upaya percepatan capaian SDGs serta sistem jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan3. Melakukan pertemuan dan diskusi dengan <i>non-government organization</i> untuk memperdalam mengenai peran mereka dalam sistem kesehatan Kroasia.4. Melakukan pendalaman tentang sistem jaminan sosial dari Pemerintah Kroasia dan bagaimana penyelenggara jaminan sosial memberikan pelayanan kepada pesertanya, termasuk manfaat	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		kesehatan dan penyelenggaraan jaminan kesehatan di Kroasia dapat menjadi masukan bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program di bidang kesehatan di Indonesia. Selain itu adanya kebutuhan mutualisme di bidang ketenagakerjaan harus menjadi peluang bagi diplomasi yang lebih kuat.	pelayanan kesehatan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja.	
2.	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IX DPR RI ke Negara Austalia	Kunjungan Komisi IX ke Negara Australia dilaksanakan pada hari Minggu s.d. Sabtu, 3 s.d. 9 Agustus 2025, bertujuan untuk: 1. Mempelajari sistem layanan primer di Australia, termasuk integrasi klinik primer (<i>General Practitioner</i>), klinik komunitas, dan sistem pembiayaan <i>Medicare</i> . 2. Menelusuri kebijakan dan sistem layanan kesehatan lansia berbasis komunitas dan teknologi. 3. Mengkaji kerangka koordinasi antara pemerintah federal dan negara bagian dalam penyediaan layanan kesehatan. 4. Menyusun rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung penguatan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), layanan primer, dan perawatan lansia di Indonesia. 5. Menggali peran organisasi serikat pekerja seperti UNION ACT dalam advokasi kebijakan ketenagakerjaan di	Kunjungan Komisi IX menghasilkan: <ul style="list-style-type: none">• Pembelajaran tentang sistem kesehatan Australia yang relevan bagi penguatan layanan primer dan lansia di Indonesia.• Rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem layanan primer dan perawatan lansia di Indonesia.• Masukan strategis untuk pembentukan kebijakan ketenagakerjaan di sektor kesehatan, termasuk perlindungan tenaga kesehatan dan penguatan peran serikat pekerja dalam reformasi layanan publik.• Terjalinnya komunikasi dan potensi kerja sama antara institusi Indonesia dan Australia di bidang kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		sektor kesehatan dan layanan sosial, serta dialog sosial antara negara, pemberi kerja, dan pekerja dalam mendukung sistem kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan.		
3.	Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI	Kunjungan Kerja Reses bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial dilaksanakan pada hari Minggu s.d. Kamis, 10 s.d. 14 Agustus 2025.	Kunjungan Kerja Reses ke: 1. Provinsi Nusa Tenggara Timur 2. Provinsi Gorontalo 3. Provinsi Maluku Utara	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	<ul style="list-style-type: none">Komisi X DPR RIKemendikdasmen RI	Kunker Diplomasi Bidang Pendidikan, Riset, dan Kebudayaan Komisi X DPR RI ke Kerajaan Belanda tanggal 30 Juli s.d. 5 Agustus 2025.	<p>Berdasarkan hasil kunjungan ke Kerajaan Belanda, Komisi X DPR RI menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan sistem pendidikan di Indonesia, sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none">Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sedang dilaksanakan oleh Komisi X DPR RI perlu mempertimbangkan praktik baik (<i>best practices</i>) yang diterapkan di Kerajaan Belanda.<ol style="list-style-type: none">Pelaksanaan pendidikan dilaksanakan oleh lembaga atau yayasan (organisasi keagamaan, lembaga sosial, maupun yayasan khusus), sedangkan pemerintah memberikan subsidi anggaran pendidikan kepada yayasan-yayasan tersebut untuk mendukung keberlangsungan operasional dan penyelenggaraan pendidikan.Untuk memastikan mutu, akuntabilitas, dan kesesuaian dengan standar yang telah ditetapkan, pengawasan pendidikan tetap dilakukan oleh <i>inspektorat pendidikan</i> yang bersifat independen, sehingga proses evaluasi dapat berlangsung objektif dan bebas dari intervensi politik maupun kepentingan penyelenggara.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> c. Kurikulum dirancang oleh lembaga atau yayasan pendidikan secara fleksibel, namun tetap mengacu pada standar minimal yang ditetapkan pemerintah dan tetap memastikan adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi berbasis capaian kompetensi. d. Proses penjurusan dilakukan lebih dini, yaitu sekitar 12 tahun, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan akademik, seperti jalur akademik, vokasi, atau teknis, sehingga siswa dapat mempersiapkan diri menghadapi jenjang pendidikan lebih tinggi. e. Pembiayaan untuk sekolah publik dijamin sepenuhnya oleh negara, sehingga peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan dasar hingga menengah secara gratis, disertai mekanisme subsidi silang untuk sekolah yang membutuhkan dukungan tambahan, termasuk sekolah disabilitas. f. Pembiayaan untuk pendidikan tinggi, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan penentuan biaya kuliah yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, sambil mendorong diversifikasi sumber pembiayaan melalui kemitraan dengan sektor swasta, dana riset internasional, dan beasiswa kompetitif. <ol style="list-style-type: none"> 2. Mendesak pemerintah, melalui LPDP, untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian skema pembiayaan bagi mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di luar negeri, khususnya di negara dengan biaya hidup tinggi seperti di Kerajaan Belanda. 3. LPDP perlu mempertahankan WUR sebagai perguruan tinggi mitra unggulan yang mendapatkan prioritas pembiayaan, mengingat reputasinya sebagai universitas terbaik dunia di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan pengelolaan lingkungan. 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4. Pemerintah perlu melakukan kajian terhadap rencana perluasan cakupan KIP Kuliah ke perguruan tinggi luar negeri, dengan memastikan adanya revisi regulasi yang diperlukan serta penguatan mekanisme monitoring dan pendampingan.	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi X DPR RI • Kemendikdasmen RI • Kemdiktisaintek RI • Kemenbud RI • Kemenpora RI • Perpusnas RI • BRIN • BPS 	Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Kota Banda Aceh Provinsi Aceh tanggal 25—29 Juli 2025.	<p>Tim Kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI ke Kota Banda Aceh merekomendasikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam alokasi anggaran pendidikan 20% dari APBN agar lebih tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, memastikan implementasi kebijakan pendidikan berjalan efektif dan efisien, termasuk dalam pemanfaatan dana Pendidikan dan mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan realisasi anggaran pendidikan, agar benar-benar sesuai dengan semangat keadilan, kualitas, dan keberlanjutan. Mendorong Kemendikdasmen RI untuk terus melakukan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program Pendidikan, antara lain perekrutan guru dan pegawai honorer di sekolah, dan regulasi tentang pemenuhan jumlah jam mengajar guru diikuti dengan pemenuhan jumlah guru. Mendorong Kemendiktisaintek RI untuk mengevaluasi pelaksanaan PTN-BH dan KIP Kuliah, mengevaluasi pemberlakuan pajak progresif terhadap PTN-BH, dan mengutamakan prinsip keadilan dalam Pemberian Tunjangan Kinerja (Tukin) antara PTN-BH dan instansi lain. Mendorong Kemenbud RI untuk menaikkan anggaran dan memperbaiki tata kelola terkait Wisata Budaya dan Sejarah Islam, 	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemajuan kebudayaan dan berperan aktif dalam mengendalikan arus globalisasi dan modernisasi yang membawa perubahan sosial dan budaya yang dapat mengancam keberlangsungan budaya lokal.</p> <p>e. Mendorong Kemenpora untuk lebih memperhatikan fasilitas Olahraga yang memadai untuk mendukung pengembangan olahraga di Banda Aceh, meningkatkan pembinaan pemuda, mendorong daya saing pemuda dalam berwirausaha, meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan dan komunitas kepemudaan, memberikan wadah pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda, meningkatkan fasilitas kegiatan kepemudaan berbasis komunitas, meningkatkan pembinaan kepramukaan di tingkat kwartir ranting (kecamatan) dan gugus depan (desa dan sekolah), meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional PON Aceh Sumut, dan meningkatkan kompetisi/turnamen reguler untuk pembinaan atlet muda.</p> <p>f. Mendorong Perpustakaan RI untuk meningkatkan minat kunjungan dan pemanfaatan layanan, meningkatkan koleksi buku yang tidak relevan dan kurang terbaru, meningkatkan jumlah tenaga profesional (pustakawan terlatih), meningkatkan sarana dan prasarana dan meningkatkan <i>event-event</i> literasi yang berbasis kearifan lokal.</p> <p>g. Mendorong BRIN berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan Peraturan Daerah mengenai pemajuan IPTEK dan Riset Inovasi Daerah.</p> <p>h. Mendorong BPS untuk memenuhi kekurangan tenaga statistik dan</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			mutasi personil data OPD yang tidak terstruktur, mengoptimalkan proses bisnis statistik dan pelaporan metadata, dan meningkatkan pemanfaatan data statistik untuk perencanaan kebijakan.	
		Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 25—29 Juli 2025.	<p>Komisi X DPR RI merekomendasikan sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none">a. Komisi X mendorong Kemendikdasmen untuk: (a) segera melakukan kajian mengenai perlunya redefinisi pendidikan gratis sehingga pemda tidak mengalami kebingungan, dan putusan MK Nomor 2/PUU XXII/2024 dapat diimplementasikan dengan baik di daerah; (b) berkoordinasi dengan Pemda DIY agar adanya jenjang karir dan status bagi guru Guru Pendamping Khusus (GPK); (c) menyelesaikan permasalahan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di jenjang pendidikan menengah yang saat ini masih belum relevan dengan syarat masuk perguruan tinggi.b. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikdasmen untuk memberikan bantuan di SLBN 1 Bantul dalam bentuk ruang audio visual di perpustakaan, dukungan sarana untuk produksi buku Braille, dan pelatihan untuk guru-guru inklusi di luar SLBN 1 Bantul.c. Komisi X mendorong Kemdiktisaintek RI untuk melakukan sinkronisasi jadwal SPMB antara PTS dan PTN serta merumuskan regulasi yang mendukung pembiayaan berkelanjutan bagi PTS, termasuk dana abadi. Komisi X DPR RI juga mendorong kebijakan afirmatif agar PTS berkontribusi optimal dalam meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi nasional.d. Komisi X DPR mendorong Kemenbud RI untuk berkoordinasi dengan Pemda agar pendataan dan implementasi Objek Pemajuan Kebudayaan di daerah dapat optimal.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>e. Komisi X mendorong Perpustakaan RI memastikan keberlanjutan program transformasi perpustakaan inklusif, serta peningkatan anggaran untuk revitalisasi perpustakaan daerah dan akreditasi perpustakaan sekolah agar layanan literasi lebih merata dan berkualitas.</p> <p>f. Komisi X mendesak BRIN untuk mendukung upaya penguatan Pemda DIY melakukan riset berbasis lokalitas.</p> <p>g. Komisi X mendorong BPS RI untuk (a) meningkatkan cakupan dan kualitas sampel statistik agar lebih representatif, serta penyajian data hingga tingkat desa yang relevan untuk kebijakan publik; (b) meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah agar penyediaan dan sinkronisasi data dapat optimal dalam mendukung pembangunan di daerah; (c) meningkatkan kesejahteraan pegawai BPS, dan revitalisasi gedung BPS Provinsi DIY dan kabupaten/kota di DIY.</p>	
		Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah tanggal 25—29 Juli 2025.	<p>Komisi X DPR RI merekomendasikan sebagai berikut.</p> <p>a. Kemendikdasmen RI memperluas skema intervensi afirmatif mencakup perluasan program Indonesia Pintar, penguatan regulasi pendidikan gratis pada sekolah swasta dengan mendukung skema Bantuan Operasional Sekolah (BOS) afirmatif, serta peningkatan kualitas guru melalui pelatihan berbasis DAK nonfisik. Program remedial berbasis komunitas juga penting untuk menanggulangi rendahnya capaian literasi dan numerasi siswa. Semua ini sejalan dengan amanat Pasal 11 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan kewajiban</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga negara.</p> <p>b. Kemendikdasmen RI menyusun <i>roadmap</i> revitalisasi peralatan vokasi yang melibatkan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) secara langsung, sebagaimana dimandatkan dalam PP No. 41 Tahun 2015 tentang Pengembangan SDM Industri. Pemerintah juga perlu meninjau ulang regulasi terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan alat agar tidak menghambat kualitas dan keterkinian teknologi yang dibutuhkan.</p> <p>c. Kemendikdasmen RI segera menyusun kebijakan teknis dan pendanaan afirmatif untuk mendukung implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya, khususnya bagi sekolah swasta dengan tetap mempertimbangkan standar pelayanan minimal (SPM) serta prinsip keadilan dalam akses pendidikan dasar sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945, serta Pasal 11 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>d. Kemdiktisaintek RI dan Kementerian PAN-RB segera mengevaluasi kembali kebijakan formasi dosen CPNS, terutama untuk PTN-BH, serta memperkuat regulasi pendanaan riset berbasis kemitraan.</p> <p>e. Kemenbud RI meninjau kembali implementasi UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan agar mampu menghadirkan kebijakan yang afirmatif dan kemudahan akses Dana Indonesiana di daerah.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>f. Pemerintah membuka kembali formasi ASN pustakawan sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Program literasi digital berbasis komunitas dan pengembangan perpustakaan inklusif juga perlu diperluas ke wilayah-wilayah tertinggal.</p> <p>g. Pemerintah membentuk kawasan sains dan teknologi di daerah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau skema lain, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Selain itu, reformasi birokrasi lembaga litbang perlu dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan mendukung inovasi berbasis kebutuhan lokal.</p> <p>h. Kemenpora RI memperkuat implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) dan meningkatkan pendanaan untuk pembangunan sarana olahraga hingga ke tingkat desa. Pelibatan dunia usaha dalam mendukung pembinaan atlet dan kegiatan kepemudaan juga harus diperkuat melalui insentif kemitraan berbasis Program CSR.</p> <p>i. BPS dan Kementerian PPN/Bappenas mempercepat penguatan tata kelola data lintas OPD daerah melalui pengembangan interoperabilitas sistem, literasi data publik, dan insentif bagi daerah yang berkinerja baik dalam penyediaan data berkualitas, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>j. Mendorong Panja RUU Sisdiknas agar menindaklanjuti beberapa usulan dari pemangku pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memasukkan pengaturan perlindungan guru, tanggung jawab satuan pendidikan masyarakat terhadap peserta didik kurang mampu, penetapan alokasi anggaran pendidikan yang spesifik, serta pengaturan desentralisasi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. 2) Mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait kewajiban pendidikan anak dalam konteks hukum, serta dengan regulasi mengenai badan hukum pendidikan agar pengaturan kewenangan PTN-BH lebih jelas. 	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI	Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dalam rangka Pengawasan ke Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 10-14 Agustus 2025.	<p>Pada hari Senin, 11 Agustus 2025 pada pukul 10.00 WIB, Tim Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh Bapak H. Fauzi Amro, M.Si bersama Anggota Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI bersama dengan Bapak Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Bidang Perasuransian OJK dan Bapak Askolani selaku Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melaksanakan pertemuan membahas perihal pelaksanaan kemudahan akses pembiayaan UMKM dan Kinerja Transfer Ke Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.</p> <p>Bertempat di Hotel Claro, Kota Makassar Ketua Tim Komisi XI DPR RI Bapak H. Fauzi Amro, M.Si menyampaikan bahwa tujuan kunker Reses kali ini adalah ingin memastikan bahwa Peraturan OJK mengenai kemudahan akses UMKM dan strategi Transfer Ke Daerah oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu bergerak secara sinergis dalam membangun fondasi fiskal daerah yang kuat dan pasar pembiayaan yang inklusif untuk menciptakan pertumbuhan UMKM yang tangguh dan merata di seluruh wilayah Indonesia dan tentunya juga penguatan bagi sektor lainnya sesuai aturan yang ada.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Dalam kunjungan reses kali ini juga dihadiri oleh 10 kepala daerah dari provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan aspirasinya perihal transfer ke daerah kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu.</p> <p>Bapak Askolani selaku Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi besar menjadi penggerak pertumbuhan kawasan timur Indonesia. Namun, perlu mendorong peningkatan kualitas belanja, kemandirian fiskal, pengendalian inflasi, serta penguatan UMKM adalah kunci agar TKD benar-benar menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.</p> <p>Sementara itu, Bapak Ogi Prastomiyono selaku Kepala Eksekutif Bidang Perasuransian OJK menyampaikan bahwa OJK sedang memfinalisasi Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi UMKM di seluruh tahapan pembiayaan.</p>	
2.	Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI	Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024 - 2025 ke Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 10-14 Agustus 2025.	<p>Menutup Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024 – 2025, Komisi XI DPR RI melaksanakan kunjungan kerja reses di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI.</p> <p>Kunjungan reses hari ini (12/08/25), Komisi XI DPR RI melaksanakan kunjungan dan pertemuan dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dihadiri juga Kementerian ESDM, dan PT. Kilang Pertamina Balikpapan (Persero) yang dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Bapak Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si beserta Anggota Komisi XI DPR RI serta dihadiri Bapak Medrilzam selaku Deputy bidang Pembangunan Wilayah Kementerian PPN/Bappenas beserta jajaran, Bapak Suminto selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Bapak Dadan Kusdiana selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, dan Bapak Bambang Harimurti selaku Direktur Utama PT. Kilang Pertamina Balikpapan (Persero).</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Dalam kunjungan dan rapat tersebut, Dr. M, Hanif Dhakiri - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Timur menempati posisi strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dengan ditetapkannya Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia. Selain itu, berbagai proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur konektivitas, kawasan industri hijau, dan proyek <i>Refinery Development Master Plan</i> (RDMP) Balikpapan menunjukkan komitmen negara dalam mendorong transformasi ekonomi daerah.</p> <p>Dr. M. Hanif Dhakiri, M.Si menekankan tiga hal penting. Pertama, investasi dari PSN harus dapat mendorong produktivitas, menghidupkan UMKM, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Kedua, pembangunan proyek strategis harus menjadi mesin pencipta lapangan kerja yang berkelanjutan, tidak hanya saat fase konstruksi tetapi juga pada masa operasional. Ketiga, PSN harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui aspek inklusi sosial, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.</p> <p>Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan menegaskan peran strategis Proyek Strategis Nasional (PSN) Kilang RDMP Balikpapan sebagai salah satu proyek prioritas yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemandirian energi, dan pemerataan pembangunan di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur.</p> <p>Hingga 10 Juli 2025, progres fisik proyek telah mencapai 95,73%. <i>Output</i> utama yang akan dicapai meliputi peningkatan produksi gasoline dari 42 KBPD menjadi 142 KBPD, diesel dari 125 KBPD menjadi 156 KBPD, avtur dari 30 KBPD menjadi 41 KBPD, LPG dari 48 KTPA menjadi 384 KTPA, serta tambahan produksi <i>propylene</i> dan sulfur yang signifikan untuk industri hilir.</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Proyek ini diharapkan memberikan <i>multiplier effect</i> besar bagi perekonomian, dengan potensi peningkatan PDB sebesar Rp514 miliar pada tahap konstruksi, realisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 35%, serta penyerapan tenaga kerja hingga 24.000 orang.</p> <p>Komisi XI DPR RI, sebagai mitra kerja pemerintah di bidang keuangan dan perencanaan pembangunan, menekankan agar kebijakan fiskal dan pengendalian pembangunan dijalankan secara tepat sasaran, efisien, dan berkeadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah, termasuk di Kalimantan Timur.</p> <p>Menutup Kunjungan Kerja Reses Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024 - 2025, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI menyampaikan bahwa Proyek Strategis Nasional bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menjadi simbol transformasi Indonesia menuju pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan dan memastikan agar Pemerintah terus mengawal perencanaan, pengendalian, dan evaluasi PSN agar selaras dengan RPJMN 2025–2029, memastikan keterpaduan proyek dengan agenda pembangunan nasional, serta mendukung penyelesaian hambatan di lapangan demi tercapainya manfaat optimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.</p>	
3.	Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI	Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 ke Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 10 s.d. 14 Agustus 2025.	<p>Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Masa Sidang IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2025. Kunker reses dipimpin oleh Bapak Mohamad Hekal, MBA, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, diikuti Bapak Dr. Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI dan beberapa anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi.</p> <p>Kunker Reses Komisi XI DPR RI dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Kepulauan Riau. Dalam kesempatan ini, Tim</p>	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Kunker Reses Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan Infinite Studios yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa. Dalam KEK Nongsa terdapat 18 pelaku usaha, yang bergerak di bidang ekonomi digital, research and development, industri kreatif, pendidikan dan pariwisata. KEK Nongsa mempekerjakan 6.925 orang dan menghidupkan ekonomi masyarakat sekitar, melalui konsumsi kebutuhan sehari-hari atau sewa tempat tinggal. KEK Nongsa juga berhasil menarik investasi dari pelaku usaha dan kampus global, diantaranya: <i>Apple Academy</i> , IBM dan <i>Royal Melbourne Institute of Technology</i> (RMIT).	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI XII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI	Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI dilaksanakan pada tanggal 10-14 Agustus 2025, ke: 1. Provinsi Bangka Belitung 2. Provinsi NTT 3. Provinsi Bali		

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI XIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KUNJUNGAN	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Masa Reses ke Kendari Sulawesi Selatan	Kunres RDP Dengan Kanwil Kementrian Hukum Sulawesi Tenggara, Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara, Kanwil Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara, Kanwil Kementrian HAM Sulawesi Selatan dan Wilayah Kerja Sulawesi Tenggara dilaksanakan tgl Jumat-Selasa / 25-29 Juli 2025.	<p>1. Kunspek Komisi XIII dalam rangka Pelaksanaan fungsi pengawasan ke kantor wilayah Ditjen Pemasyarakatan Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan</p> <p>2. Komisi XIII DPR RI mendukung percepatan penyediaan kantor yang representatif bagi Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sulawesi Tenggara yang saat ini masih menempati Kantor Rubasan, pengadaan fasilitas pendukung di Lapas dan Rutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, serta mencegah munculnya kejadian baru di Lapas dan Rutan dikarenakan minimnya petugas yang melakukan pengawasan terhadap Wargabinaan seperti CCTV, X-Ray, dan alat pengacak sinyal <i>handphone</i>.</p> <p>3. Komisi XIII DPR RI memberikan apresiasi kepada Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra atas langkah antisipatifnya dalam menghadapi dinamika lalu lintas orang melalui penguatan koordinasi antar-instansi dan pengaktifan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Kesiapan infrastruktur dan</p>	

NO	KUNJUNGAN	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang intelijen keimigrasian.</p> <p>4. Komisi XIII DPR RI mendukung pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi di Kabupaten Kolaka dalam rangka memaksimalkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat maupun pengawasan terhadap lalu lintas orang asing di Kabupaten Kolaka dan sekitarnya.</p> <p>5. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara yang telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat serta telah mensukseskan pembentukan Koperasi Merah Putih di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.</p> <p>6. Komisi XIII DPR RI mendukung percepatan penyediaan Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka meningkatkan layanan keimigrasian dan pengawasan lalu lintas orang asing di wilayah Sulawesi Tenggara.</p> <p>7. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi komitmen Kanwil KemenHAM Sulawesi Selatan Wilayah Kerja Sulawesi Tenggara dalam penguatan nilai-nilai HAM bagi aparatur sipil negara dan kepada masyarakat.</p> <p>8. Komisi XIII DPR RI mendukung percepatan pembentukan Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Sulawesi Tenggara mengingat keberagaman masyarakat adat yang tersebar di pulau-pulau dan sebagai wilayah pertambangan yang</p>	

NO	KUNJUNGAN	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>memerlukan pemahaman hukum yang kontekstual dan berbasis HAM.</p> <p>9. Komisi XIII DPR RI meminta jawaban tertulis dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM di Provinsi Sulawesi Tenggara terkait dengan apa yang sudah disampaikan anggota Komisi XIII DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Kunjungan Reses paling lambat 7 hari kerja.</p>	
2.	Kunjungan Kerja masa reses ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)	Kunres dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI yang membidangi hukum, HAM, keimigrasian, pemasyarakatan, penanggulangan terorisme, perlindungan saksi dan korban, serta pembinaan ideologi Pancasila dilaksanakan tgl Jumat-Selasa / 25-29 Juli 2025.	<p>1. Komisi XIII DPR RI mendukung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT melakukan percepatan reformasi hukum, penambahan pembangunan Kantor Unit Layanan Hukum di kabupaten/kota, penyusunan peraturan daerah strategis berbasis data desa/kelurahan, serta mendorong adanya regulasi nasional guna menunjang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di wilayah kepulauan.</p> <p>2. Komisi XIII DPR RI mendukung Kepala Kantor Wilayah Imigrasi NTT dalam meningkatkan status kelembagaan Kantor Imigrasi Atambua dan Kantor Imigrasi Labuan Bajo menjadi Kantor Imigrasi Kelas I, melakukan pengadaan fasilitas imigrasi modern di Bandara Komodo, melakukan pembangunan fasilitas tempat tinggal/mes untuk pegawai, untuk membentuk kantor baru di Pulau Sumba dalam memperkuat pelayanan dan pengawasan keimigrasian di kawasan perbatasan dan destinasi wisata internasional.</p>	

NO	KUNJUNGAN	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>3. Komisi XIII DPR RI mendukung Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan NTT mengoptimalkan program integrasi dan redistribusi narapidana yang telah menciptakan pemerataan isi hunian, menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan dan akomodasi, serta menjamin pemenuhan hak dasar warga binaan di seluruh UPT pemasyarakatan.</p> <p>4. Komisi XIII DPR RI mendukung Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan NTT untuk menambah Balai Pemasyarakatan Ende dengan melakukan pembangunan Lapas/Rutan di daerah yang belum memiliki UPT Pemasyarakatan, seperti Labuan Bajo dan Sabu Raijua, serta mendorong pembentukan Forum Daerah Pemasyarakatan (FORDAPAS) beserta penyusunan regulasi pendukung.</p> <p>5. Komisi XIII DPR RI mendorong Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT untuk pembangunan gedung Kantor Wilayah HAM di Provinsi NTT serta untuk membentuk Kantor Wilayah HAM di Provinsi NTB dan Bali guna meningkatkan efektivitas identifikasi dan penanganan kasus pelanggaran HAM dengan melibatkan lintas sektor, seperti aparat penegak hukum dan organisasi masyarakat sipil setempat, terutama dalam menangani kasus TPPO dan kekerasan terhadap anak.</p> <p>6. Komisi XIII DPR RI mendorong Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT untuk membentuk unit atau bidang khusus dalam struktur Kanwil yang berfokus pada pelaksanaan program aksi HAM agar dapat menangani</p>	

NO	KUNJUNGAN	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>pendampingan bagi korban, serta pemantauan pelaksanaan program prioritas nasional yang berorientasi pada perspektif HAM di wilayah NTT.</p> <p>7. Komisi XIII DPR RI mendukung penguatan peran Perwakilan LPSK di daerah sebagai bagian dari kebijakan LPSK untuk mempermudah dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan melalui pembentukan Perwakilan LPSK di NTT dan pos penghubung di wilayah-wilayah terkait.</p> <p>8. Komisi XIII DPR RI meminta Jawaban tertulis dan hal-hal yang belum disampaikan dari Kepala Kantor Wilayah Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Pemasarakatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM dan LPSK Provinsi Nusa Tenggara Timur, terkait dengan apa yang sudah disampaikan anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat Kunjungan Kerja Reses paling lambat 7 hari kerja.</p>	
3.	Kunjungan Kerja Masa Reses ke Provinsi Kalimantan Timur	Kunres dalam rangka melakukan fungsi pengawasan khususnya terhadap penyelenggaraan pelaksanaan sistem pemsarakatan dan sistem keimigrasian, penyelenggaraan Hak Asasi Manusia, dan pelayanan serta penegakan hukum di Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan	<p>1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kerja keras dan loyalitas seluruh jajaran Kantor wilayah atas pencapain kinerja yang ditunjukkan Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil Kementerian HAM, Kanwil Ditjen Imigrasi dan Kanwil Ditjen Pemasarakatan, serta dukungan anggaran termasuk pemberian asuransi walaupun saat ini Pemerintah sedang melakukan kebijakan efisiensi anggaran.</p> <p>2. Komisi XIII DPR RI mendorong agar Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur, lebih proaktif memperluas jangkauan program bantuan hukum melalui pos bantuan</p>	

NO	KUNJUNGAN	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		tgl Jumat-Selasa / 25-29 Juli 2025.	<p>hukum, peningkatan jumlah dan kapasitas lembaga bantuan hukum terakreditasi, khususnya di wilayah perbatasan dan pedalaman guna memastikan layanan hukum berbasis kepada pemerataan dan keadilan sosial.</p> <p>3. Komisi XIII DPR RI mendorong agar Kanwil Kementerian Hukum aktif melakukan edukasi massal dan jemput bola terkait pendaftaran hak kekayaan intelektual (HAKI) kepada penulisan karya ilmiah, pelaku usaha lokal, pengrajin, dan pelestari budaya daerah dengan mekanisme fasilitasi pendaftaran HAKI secara kolektif dan murah bagi komunitas lokal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap potensi ekonomi berbasis kearifan lokal dan mendorong agar Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Timur memperkuat akses layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) berbasis digital serta dalam meningkatkan PNBPN.</p> <p>4. Komisi XIII DPR RI meminta Kanwil Ditjen Imigrasi Kalimantan Timur meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan otoritas bandara/pelabuhan dalam menangani potensi penyelundupan manusia dan TPPO, serta perlu ada sistem monitoring berbasis intelijen dan pemeriksaan dokumen secara ketat di titik-titik keberangkatan maupun kedatangan dalam mengimplementasi teknologi biometrik serta integrasi data dokumen keimigrasian.</p> <p>5. Komisi XIII meminta Kanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Kalimantan Timur memperkuat sistem pengawasan orang asing (PORA) secara komprehensif, baik dari segi sumber daya manusia, sistem pelaporan, hingga digitalisasi proses pengawasan izin tinggal (KITAS/KITAP). Pengawasan terhadap tenaga kerja asing harus dilakukan secara</p>	

NO	KUNJUNGAN	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>berimbang, tidak diskriminatif namun tegas terhadap pelanggaran izin tinggal maupun penyalahgunaan dokumen.</p> <p>6. Komisi XIII DPR RI mendorong percepatan pembangunan sistem intelijen imigrasi di Kanwil Ditjen Imigrasi Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan SDM yang kompeten dan sistem pelaporan yang terintegrasi. Selain itu, penanganan isu kewarganegaraan ganda, kawin campuran, dan status anak hasil perkawinan lintas negara harus ditangani dengan pendekatan kolaboratif bersama instansi lain seperti Kemenlu, Dukcapil, dan Kemenag agar didapatkan kepastian hukumnya.</p> <p>7. Komisi XIII DPR RI mendorong Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Kalimantan Timur merencanakan skema pembangunan fasilitas baru, redistribusi narapidana, serta program alternatif lainnya yang dapat mengurangi beban rutan dan lapas-lapas serta melakukan penguatan sistem intelijen pemasyarakatan, penempatan narapidana berisiko tinggi di blok khusus, dan penggunaan teknologi pemantauan berbasis digital dan memberikan sanksi yang tegas bagi petugas lapas yang abai dan turut melakukan pelanggaran.</p> <p>8. Komisi XIII DPR RI mendorong Kanwil Kementerian HAM Provinsi Kalimantan Timur melakukan pemetaan tematik dan spasial terhadap berbagai bentuk potensi pelanggaran HAM yang menonjol, seperti konflik agraria, pelanggaran terhadap masyarakat lokal, diskriminasi terhadap perempuan dan anak, disabilitas, serta hak atas lingkungan hidup sehingga advokasi dan intervensi kebijakan HAM akan lebih akurat dan tepat sasaran.</p> <p>9. Komisi XIII DPR RI mendorong agar Kanwil Kementerian HAM</p>	

NO	KUNJUNGAN	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>Provinsi Kalimantan Timur melibatkan pelaku usaha dalam penerapan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM. Termasuk penyusunan panduan tanggung jawab sosial berbasis HAM, fasilitasi pelatihan bagi korporasi, serta pembentukan sistem mediasi HAM antara masyarakat dan pelaku usaha.</p> <p>10. Komisi XIII DPR RI mendorong perluasan program Desa/Kelurahan Sadar HAM, layanan konsultasi HAM masyarakat berbasis komunitas, dan penyuluhan HAM di lembaga pendidikan dan mendorong memiliki mekanisme respons cepat untuk memberikan perlindungan dan penguatan HAM di Kalimantan Timur.</p> <p>11. Komisi XIII DPR RI meminta jawaban tertulis dari masing-masing Kantor Wilayah paling lama 7 (tujuh) hari kerja.</p>	
4.	Kunjungan Kerja Luar Negeri di Masa Reses Ke Guangzhou, China	Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dan Rapat Dengar Pendapat dengan KJRI Guangzhou, China dilaksanakan tgl Jumat-Kamis / 08-14 Agustus 2025	<p>1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi dan mendukung kinerja KJRI Guangzhou Tiongkok, khususnya dalam hal pengawasan, perlindungan, dan layanan keimigrasian bagi Warga Negara Indonesia (WNI), mencerminkan pengakuan atas peran pentingnya KJRI dalam memastikan hak dan keamanan WNI di wilayah kerjanya.</p> <p>2. Komisi XIII DPR RI meminta KJRI Guangzhou melakukan terobosan kebijakan untuk meningkatkan investasi Tiongkok-Indonesia serta terus berinovasi dan memberikan masukan yang komprehensif terkait hubungan Indonesia dan Tiongkok</p> <p>3. Komisi XIII DPR RI mendorong KJRI Guangzhou untuk meningkatkan pengawasan dan sosialisasi berkala kepada WNI. Langkah ini sangat penting untuk mencegah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan memastikan WNI mendapatkan informasi yang akurat yang berkaitan dengan lapangan kerja dan relevan untuk keselamatan WNI</p>	

NO	KUNJUNGAN	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>hususnya di wilayah kerja KJRI Guangzhou.</p> <p>4. Komisi XIII DPR RI meminta KJRI dan konsul Imigrasi Guangzhou untuk memberikan masukan melalui Komisi XIII untuk meningkatkan volume perdagangan dan kualitas hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok</p> <p>5. Komisi XIII DPR RI meminta KJRI Guangzhou khususnya konsul Imigrasi untuk memanfaatkan aset WN Tiongkok ex WNI yang dipulangkan dari Indonesia untuk menjadi duta-duta diplomasi Indonesia-Tiongkok untuk meningkatkan perdagangan dan hubungan <i>diplomatic</i> pada umumnya.</p>	

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	Diplomasi Parlemen pada tanggal 8 – 14 Agustus 2025.	Dalam rangka Penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga ke Jepang, Hongkong, dan Korea Selatan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Meksiko ke Meksiko dilaksanakan pada tanggal 25 - 31 Juli 2025.	<p>Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Meksiko yang diketuai oleh Dr. Ir. Herman Khaeron (F-PD) mengadakan kunjungan ke Meksiko pada tanggal 25 – 31 Juli 2025. Delegasi beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga (F-PG) 2. Dr. Jefry Romdonny (F-PGerindra) 3. Nafa Urbach (F-Pnasdem) 4. Dini Rahmania (F-Pnasdem) 5. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono (F-PD) 6. Bramantyo Suwondo (F-PD) 7. Fathi (F-PD) <p>Dalam kunjungan tersebut, delegasi berkesempatan untuk mengadakan pertemuan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Pertanian dan Pengembangan Pedesaan (SADER) Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Meksiko yang dipimpin oleh Ketua GKSB Meksiko, Herman Khaeron (F-PD), melakukan pertemuan dengan Sekretariat Pertanian dan Pengembangan Pedesaan (SADER) di Meksiko pada hari Senin (28/07/2025). <p>Pertemuan tersebut membahas mengenai potensi kerja sama Indonesia dan Meksiko dalam bidang-bidang strategis, meliputi pertanian, perdagangan, bioenergi, dan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu mitra penting perdagangan Indonesia, pertemuan ini diharapkan dapat mempererat hubungan bilateral dan mendukung komitmen lebih lanjut</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>bersama Pemerintah Meksiko dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara.</p> <p>Turut serta dalam delegasi tersebut, Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Meksiko, Bramantyo Suwondo (F-PD), Edhie Baskoro Yudhoyono (F-PD), Fathi (F-PD), Nafa Urbach (F-PNASDEM), Dini Rahmania (F-PNASDEM), Jefry Romdonny (F-PGERINDRA), dan Umbu Kabunang Hunga (F-PG).</p> <p>2. Grup Kerja Sama Bilateral Meksiko – Indonesia</p> <p>Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Meksiko yang dipimpin oleh Ketua GKSB Meksiko, Herman Khaeron (F-PD), melaksanakan pertemuan dengan Ketua Grup Kerja Sama Bilateral Meksiko-Indonesia, Mrs. Teresa Ginez Serrano pada hari Senin (28/07/2025).</p> <p>Pertemuan ini merupakan momentum mempererat hubungan bilateral kedua parlemen. Selain itu, pertemuan ini membahas mengenai potensi lebih lanjut komitmen strategis multisektor dalam mewujudkan kerangka kerja sama ekonomi, investasi, dan perdagangan. Delegasi juga menyatakan dukungan penuh dalam menindaklanjuti komitmen kerja sama dalam bidang-bidang seperti pangan, pertanian, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata yang telah dilaksanakan sebelumnya.</p> <p>3. KBRI Mexico</p> <p>Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Meksiko yang dipimpin oleh Ketua GKSB Meksiko, Herman Khaeron (F-PD), menghadiri undangan makan malam bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia Mexico City pada hari Senin (28/07/2025).</p> <p>Delegasi GKSB disambut hangat oleh Kuasa Usaha Ad Interim, Bapak Bimo Ariawan. Ketua GKSB Meksiko juga menyatakan dukungan dalam upaya penguatan kerja sama Meksiko dan Indonesia, baik melalui kebijakan yang mendukung perdagangan dan investasi, maupun melalui</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>diplomasi budaya yang semakin inklusif dan berkelanjutan. Selama sesi ramah tamah, delegasi berkesempatan untuk menyaksikan persembahan seni dan melihat instalasi budaya Indonesia di KBRI <i>Mexico City</i>.</p> <p>4. Institut Film Mexico (IMCINE) Delegasi GKSB DPR RI - Parlemen Meksiko yang dipimpin oleh Ketua GKSB Meksiko, Herman Khaeron (F-PD), melaksanakan kunjungan dan pertemuan dengan Institut Film Meksiko (IMCINE) pada hari Rabu (30/07/2025). Dalam pertemuan tersebut, Delegasi GKSB Meksiko membahas mengenai peluang kerja sama dalam bidang museum dan pameran budaya. Hal ini merupakan upaya mendukung penampilan perjalanan panjang kolaborasi budaya dan politik kedua negara selama lebih dari tujuh dekade. Selain itu, delegasi juga berkesempatan untuk mengenal lebih lanjut mekanisme dan hasil karya IMCINE selama beberapa tahun belakang.</p>	
2.	KSI - BKSAP	<i>6th World Conference of Speakers of Parliament, Jenewa, Swiss</i> dilaksanakan pada tanggal 29-31 Juli 2025.	<p>Mewakili Ketua DPR RI, Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera tegaskan komitmen Indonesia dalam menjunjung tinggi Piagam PBB dan hukum internasional di forum tingkat tinggi. Komitmen ini disampaikan pada acara <i>6th World Conference of Speakers of Parliament</i> yang dilaksanakan pada tanggal 29-31 Juli 2025 di Jenewa, Swiss.</p> <p>Dalam pidatonya, Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa dialog ini sejalan dengan nilai-nilai dan komitmen historis Indonesia, seperti Dasasila Bandung, yang menekankan perdamaian, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kedaulatan. “Prinsip-prinsip ini tetap relevan hingga kini, sebagaimana pada masa awal tatanan dunia pasca-perang.”</p> <p>Ia menegaskan bahwa parlemen memiliki peran unik dalam menjaga norma global, melalui diplomasi parlemen, fungsi legislasi, dan pengawasan.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			"Parlemen Indonesia terus mendorong penguatan kerja sama multilateral untuk memastikan prinsip-prinsip Piagam PBB ditegakkan," lanjutnya. Mardani menutup dengan ajakan kolaborasi internasional. "Hubungan internasional harus dibangun atas dasar kepercayaan, keadilan, dan penghormatan hukum, bukan kekuatan dan pemaksaan. Indonesia siap bekerja sama dengan semua mitra demi perdamaian dunia dan generasi mendatang," tegasnya.	
3.	KSB - BKSAP	Kunjungan Diplomasi BKSAP DPR RI ke Papua Nugini dilaksanakan pada tanggal 2- 8 Agustus 2025.	<p>Delegasi BKSAP DPR RI yang dipimpin oleh Muhammad Husein Fadlulloh (F-PGerindra) mengadakan kunjungan diplomasi BKSAP ke PNG pada tanggal 2- 8 Agustus 2025. Delegasi beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Dr. Mardani Ali Sera2. Irine Yusiana Roba Putri3. Bramantyo Suwondo4. Gilang Dhielafararez5. Idrus Salim Al Jufri6. Dewi Coryati <p>Pada kunjungan tersebut, Delegasi BKSAP berkesempatan untuk mengadakan pertemuan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. KBRI Papua Nugini <p>Delegasi BKSAP DPR RI mengunjungi KBRI Papua Nugini untuk memperkuat diplomasi parlemen dalam hubungan bilateral yang telah terjalin sejak 1975. Andriana Supandy Dubes RI untuk PNG menegaskan bahwa meskipun terdapat simpati beberapa LSM lokal terhadap OPM, namun pemerintah PNG di bawah PM James Marape tidak mendukung gerakan tersebut, sehingga menciptakan stabilitas dalam hubungan kedua negara.</p> <p>Indonesia telah menunjukkan komitmen nyata melalui pemberian 2.000 beasiswa kepada warga PNG dan penyediaan pasokan listrik ke Wutung melalui PLN. Maka dari itu, kerja sama GKSB yang ditandatangani</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>September 2024 menjadi fondasi penguatan legislatif bilateral menjelang kunjungan Presiden Prabowo pada 15 September 2025 dalam rangka HUT ke-50 PNG.</p> <p>Ketua BKSAP Mardani Ali Sera memberikan apresiasi kepada Dubes RI untuk PNG beserta jajaran atas kerja kerasnya dalam meningkatkan hubungan diplomatik RI dan PNG. Selanjutnya, Mardani menekankan pentingnya diplomasi parlementer yang fleksibel dan interaksi aktif dengan mitra strategis seperti dalam BRICS dan kawasan Asia-Pasifik, guna mendukung diplomasi Pemerintah di kancah global.</p> <p>Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo menggarisbawahi peran strategis pendidikan dan budaya sebagai instrumen diplomasi jangka panjang melalui program beasiswa dan darmawisma untuk memperkuat hubungan <i>people-to-people</i>.</p> <p>Di sisi lain, Wakil Ketua BKSAP Husein Fadluloh yang juga anggota Komisi VI DPR RI dan Irine Yusiana Roba Putri yang juga anggota Komisi V DPR RI menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMN, khususnya PLN dan DAMRI, dalam pembangunan perbatasan melalui koordinasi dengan kedua komisi tersebut. Sejalan dengan itu, Anggota BKSAP DPR RI Dewi Coryati dan Anggota BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong peningkatan diplomasi budaya dan penguatan GKSB sebagai pilar utama kerja sama parlemen, termasuk melalui simbol budaya seperti patung Michael Somare.</p> <p>Lebih lanjut, Anggota BKSAP DPR RI Idrus Salim Al Jufri menegaskan bahwa stabilitas perbatasan dan keamanan tetap prioritas, termasuk penanganan serius isu penyelundupan dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, ia juga mendorong pengusaha Indonesia berinvestasi di PNG untuk memberikan nilai ekonomi nyata bagi kerja sama bilateral yang berkelanjutan.</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<p>2. Peresmian Monuman Sir Michael Thomas Somare</p> <p>Papua Nugini meresmikan monumen nasional untuk menghormati Sir Michael Thomas Somare dalam upacara khidmat di depan Gedung Parlemen Port Moresby, Kamis malam, 07 Agustus 2025.</p> <p>Monumen perunggu Sir Michel Thomas Somare berdiri menghadap Parlemen Nasional. Monumen tersebut dibangun sebagai penghormatan kepada Perdana Menteri pertama dan bapak pendiri Papua Nugini. Upacara peresmian dihadiri tokoh-tokoh penting negara, termasuk Lady Veronica Somare, Gubernur Jenderal Sir Bob Dadae, Ketua Parlemen Job Pomat, Ketua Mahkamah Agung Sir Gibbs Salika, dan Wakil Perdana Menteri John Rosso, dan para perwakilan negara-negara sahabat.</p> <p>Khusus dari Indonesia, diwakili oleh Dubes Indonesia untuk Papua Nugini Dr. Andriana Supandy, dan Ketua BKSAP DPR RI Dr.H. Mardani Ali Sera, MEng.</p> <p>Pemerintah Papua Nugini memandang kehadiran perwakilan diplomatik dari negara-negara Asia, Pasifik, dan Negara-negara Persemakmuran, menunjukkan pengakuan internasional terhadap warisan diplomasi Sir Michael Somare.</p> <p>Monumen Sir Michel Somare Memperkuat Hubungan Indonesia-Papua Nugini</p> <p>Sementara itu, Duta Besar Andriana Supandy meyakini bahwa diplomasi budaya melalui peresmian monumen Sir Michael akan memperkuat kerja sama kedua negara. “Hubungan diplomatik kita akan semakin lincah, lugas dan saling menguntungkan,” Ujar Andrina</p> <p>Ketua BKSAP Mardani Ali Sera menilai peresmian patung ini akan membuka jalan yang lebih luas bagi kerja sama Indonesia-Papua Nugini. Hal ini semakin menggembirakan mengingat Presiden Prabowo</p>	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Subianto telah menyatakan kesediaan hadir dalam peringatan HUT Kemerdekaan Papua Nugini ke-50 pada 16 September mendatang. "Kita bangga karena Presiden Prabowo adalah kepala negara pertama yang menyatakan kesediaan hadir," ujar Mardani. "Menurut Dubes Andriana, PM James Marape sangat senang hingga menggelar jumpa pers khusus terkait kesediaan Presiden Prabowo menghadiri perayaan bersejarah tersebut."	
4.	KSB - BKSAP	Pertemuan Pimpinan BKSAP dengan Delegasi Staf Kongres AS dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2025.	Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera, bersama Wakil Ketua Ravindra Airlangga menerima kunjungan US <i>Congressional Staffers</i> untuk membahas studi banding antar-keparlemenan dan isu strategis di sektor ekonomi, energi, serta diplomasi kedua negara. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas peluang kolaborasi di sektor mineral, hilirisasi energi, pendidikan, teknologi, hingga perlindungan WNI di AS. Delegasi AS juga menyoroti kesamaan nilai antara semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan E Pluribus Unum sebagai fondasi persatuan dalam keberagaman. BKSAP DPR RI pun berencana melakukan kunjungan balasan ke Amerika Serikat untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor.	
5.	KSR - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> dengan Parlemen Muda AIPA (<i>Young Parliamentarians of AIPA – YPA</i>) Malaysia dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2025.	Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga (F PG) bersama Anggota GKSB DPR RI-Parlemen Malaysia, Anggota BKSAP, Eva Monalisa (F PKB) menerima kunjungan kerja Ketua Parlemen Muda AIPA (<i>Young Parliamentarians of AIPA - YPA</i>) Dato' Indera Mohd Shahar Bin Abdullah dan Anggota YPA Malaysia, Mohammed Taufiq Bin Joharid, dan Vivian Wong Shir Yee, Kamis 7 Agustus 2025 di Gedung DPR RI, Senayan-Jakarta. BKSAP menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antar parlemen muda di ASEAN, yang jumlah pemudanya mencapai 224,2 juta jiwa (sepertiga dari total penduduk ASEAN) dengan prosentase anggota muda sebesar 21,18%.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Ketua Parlemen Muda AIPA menegaskan pentingnya kolaborasi antara parlemen muda dan generasi muda untuk mempersiapkan anggota parlemen muda masa depan. Prosentase parlemen muda (di bawah 30 tahun) Malaysia saat ini masih kurang dari 20% sehingga perlu memberikan ruang lebih besar bagi pemuda di ranah politik. Penerimaan kunjungan Kerja Parlemen Muda Malaysia menjadi rangkaian kegiatan menuju Sidang Umum ke-46 AIPA yang akan dilaksanakan pada 15-22 September 2025 mendatang di Kuala Lumpur, Malaysia.	
6.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Ketua BKSAP dengan Duta Besar Selandia Baru dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2025.	Pimpinan Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menerima kunjungan kehormatan (<i>Courtesy Call</i>) dari Kedutaan Besar Selandia Baru yang dipimpin langsung oleh Duta Besar H.E. Mr. Philip Taula di Jakarta (11/08/2025) Dalam pertemuan tersebut, membahas rencana kunjungan Pimpinan BKSAP DPR RI ke Selandia Baru sebagai langkah untuk memperkuat hubungan bilateral. Diskusi juga menyoroti pentingnya memperluas kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai sektor strategis serta mendorong kemitraan yang berkesinambungan. Selain membangun hubungan di tingkat pemerintahan, kedua pihak menekankan pentingnya mempererat interaksi antar masyarakat (<i>people-to-people</i>). Beberapa sektor yang menjadi fokus pembahasan meliputi pendidikan, pertanian, energi, dan penanganan perubahan iklim yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan demi kepentingan bersama.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	DPRK Teluk Wondama	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Agustus 2025.	Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme kelembagaan dan memperkuat etika politik DPRK melalui pendekatan kelembagaan yang lebih bersifat edukatif dan pembinaan, bukan semata-mata berbasis aturan atau sanksi. DPRK juga menekankan pentingnya peran Badan Kehormatan dalam membangun budaya etik internal serta mencari solusi atas tantangan dalam menjaga independensi lembaga di tingkat daerah.	
2.	DPRD Kabupaten Kuningan	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Rabu, 6 Agustus 2025.	Dalam rangka konsultasi mengenai tugas pokok dan fungsi Badan Kehormatan (BK) DPRD terkait penanganan penyelesaian pengaduan masyarakat.	
